



HASIL RISET

Problem Intoleransi Jadi Beban DIY

Sunartono
Sunartono@harianjogja.com

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan terus berusaha menurunkan beban intoleransi secara maksimal. Pernyataan Sultan itu dilontarkan menanggapi hasil riset Setara Institute yang menunjukkan DIY termasuk 10 besar daerah paling intoleran di Indonesia selama lima tahun terakhir.

"Mungkin saja, saya enggak tahu persis, dasar [penelitian dari Setara Institute] saya enggak tahu," kata Sultan di sela-sela Gor Amongraga, Kota Jogja, Senin (25/11).

▶ Halaman 7

PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN DI INDONESIA

Setara Institute memaparkan hasil riset yang diberi judul *Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri* dalam acara Konferensi Pers yang diselenggarakan pada Minggu, (24/11). Dalam riset longitudinal Setara Institute dalam 12 tahun terakhir pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. DIY masuk dalam daerah dengan peristiwa intoleransi tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Provinsi	Kasus
Aceh	121
Sumatra Utara	106
DKI Jakarta	291
Jawa Tengah	158
Sulawesi Selatan	112
Sumatra Barat	104
Banten	90
Jawa Barat	629
Jawa Timur	270
Nusa Tenggara Barat	76

KOMPOSISI 10 PROVINSI dengan peristiwa tertinggi, tersebut mengalami sedikit perubahan jika spektrum waktunya dipersempit dalam lima tahun terakhir atau pemerintahan Presiden pertama Presiden Joko Widodo.

Kota	Kasus
Jawa Barat	162
DKI Jakarta	113
Jawa Timur	98
Jawa Tengah	66
Aceh	65
DIY	37
Banten	36
Sumatra Utara	28
Sulawesi Selatan	27
Sumatra Barat	23

INDEKS KOTA TOLERAN 2017

Toleransi Tinggi ▲		Toleransi Rendah ▼	
Kota	Skor	Kota	Skor
Manado	5,90	DKI Jakarta	2,30
Pematangsiantar	5,90	Banda Aceh	2,90
Salatiga	5,90	Bogor	3,05
Singkawang	5,90	Cilegon	3,20
Tual	5,90	Depok	3,30
Binjai	5,80	Kota Jogja	3,40
Kotamobagu	5,80	Banjarmasin	3,55
Palu	5,80	Makassar	3,65
Tebing Tinggi	5,80	Padang	3,75
Surakarta	5,72	Mataram	3,78

INDEKS KOTA TOLERAN 2018

Toleransi Tinggi ▲		Toleransi Rendah ▼	
Kota	Skor	Kota	Skor
Singkawang	6,513	Tanjung Balai	2,817
Kota Salatiga	6,447	Banda Aceh	2,830
Pematang Siantar	6,280	Jakarta	2,880
Manado	6,030	Cilegon	3,420
Ambon	5,960	Padang	3,450
Kota Bekasi	5,890	Depok	2,490
Kota Kupang	5,857	Bogor	3,533
Kota Tomohon	5,833	Makassar	3,637
Binjai	5,830	Medan	3,710
Kota Surabaya	5,823	Sabang	3,757

Sumber: Setara Institute

Instansi	Nilai Berita
1.	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

Problem Intoleransi...

Pada Minggu (24/11), Setara Institute memaparkan hasil riset *Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri*. Hasil riset itu terbagi dua yaitu dalam 12 tahun terakhir pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Serta data lima tahun terakhir.

Mengacu pada hasil riset Setara dalam 12 tahun terakhir, DIY tidak masuk dalam 10 besar daerah dengan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terbanyak. Namun, untuk lima tahun terakhir DIY masuk di posisi enam dengan 37 kasus. (selengkapnya lihat grafis)

Selain itu, pada 2018, Setara Institute pernah mengeluarkan Indeks Kota Toleran 2018. Berdasarkan riset itu toleransi di Kota Jogja membaik. Peralpnya, pada 2017, Kota Jogja masuk dalam kategori Kota yang tingkat toleransinya rendah. Kota Jogja menduduki peringkat enam, dengan skor 34,40. Adapun pada 2018, Kota Jogja tidak masuk daftar.

Sultan menyatakan Pemda DIY terus berusaha secara maksimal untuk menurunkan adanya tindakan

yang mengarah ke intoleransi di DIY. Menurutnya upaya itu sebenarnya secara perlahan sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

"Kami kan hanya bisanya mencoba untuk menurunkan beban intoleransi itu secara maksimal, sebetulnya perkembangan itu sudah terjadi, hanya sekarang [intoleransi] modelnya kearifan lokal, ganti motif," ucapnya.

Upaya konkret yang dilakukan, lanjut Sultan, tidak hanya literasi, tetapi penanganan secara cepat terhadap setiap kasus intoleransi. Ia menyinggung soal tidak diizinkanngnya Masjid Gede Kauman untuk suatu kegiatan beberapa waktu lalu dinilai sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjadikan Jogja tetap toleran. "Di samping literasi, kejadian-kejadian itu kami tangani, karena [setiap kejadian] hanya akan menumbuhkan intoleransi, makanya kami sering keras kalau ada hal-hal yang kurang berkenan [mengarah ke intoleransi]. Masjid Agung pun kraton tidak boleh untuk kepentingan lain, itu semua kan hanya untuk [menekan] intoleransi," tegasnya.

Ditanya soal banyaknya kasus intoleransi yang sering terjadi di

Bantul, Sultan tak berkomentar banyak. "Enggak tahu, mungkin domisilinya [pihak yang intoleran] di sana," ucapnya.

Beberapa Indikator

Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengatakan dalam lima tahun terakhir di masa pemerintahan Jokowi, lima teratas provinsi dengan tingkat pelanggaran kebebasan beragama tidak berubah. "Tetapi DIY masuk, Banten naik dan Sumatra Utara turun. NTB keluar dari 10 besar," kata Halili dalam diskusi bertajuk Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Minggu (24/11), dikutip okezone.

Menurut Halili, terdapat empat faktor penyebab meningkatnya intoleransi di DIY, yakni institusi yang diduga melakukan pembiaran, regulasi yang diskriminatif, aktor-aktor lokal yang intoleran, serta peran masyarakat sipil.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli lalu juga merilis Indeks Kebebasan Berkeyakinan. Mengacu data BPS, skor kebebasan berkeyakinan di DIY dan 19 provinsi lain di Indonesia menurun. Terdapat beberapa

indikator yang menentukan penilaian tentang kebebasan berkeyakinan, salah satunya yakni aturan yang membatasi umat beribadah.

Sementara itu, Berdasarkan data Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) di DIY ada 10 kasus intoleransi yang didominasi kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di DIY pada 2018, terdiri dari enam kasus baru dan empat kasus lama.

Adapun pada 2019 ini terdapat tiga kasus intoleransi yang tercatat media ini. Ketiganya terjadi di Bantul. Tiga problem tasamuh itu yakni pertama penolakan pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI) Sedayu, Bantul, yang berujung gugatan ke PTUN atas pembatalan IMB yang dilakukan Pemkab Bantul; kasus kedua, penolakan warga di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, atas bermukimnya pendatang yang berbeda keyakinan, dan ketiga, kasus penghentian upacara Piodalan di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Bantul karena mendapat protes dari sekelompok warga.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005